



The Problems and Dilemmas of Implementing the MBKM Curriculum Education Study Program in the Social Science in the Lombok Region

Problematika dan Dilema Implementasi Kurikulum MBKM Program Studi Kependidikan Rumpun IPS di Daerah Lombok

Hanapi^{1)*}, I Wayan Lasmawan²⁾, I Gusti Putu Suharta³⁾

¹⁾Universitas Hamzanwadi

²⁾Universitas Pendidikan Ganesha

Correspondence: hanapi@hamzanwadi.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) curriculum in education study programs at private universities in the social sciences cluster in Lombok is still facing various problems and dilemmas, even though the government has established regulations and guidelines for its implementation. This study aims to identify the challenges of implementing the MBKM curriculum in private tertiary education study programs within the IPS (Social Sciences) family in Lombok. It also seeks to analyze and elaborate on the dilemmas that arise during its implementation. The study utilizes a qualitative method by combining two types of methods, namely library research (literature review) and field study. The findings of this study indicate a lack of budgetary support from most institutions, including insufficient competence and concern among lecturers, resulting in a low level of student interest in the implementation. On the other hand, the dilemma faced in its implementation is that the curriculum and academic culture are primarily developed internally within tertiary institutions, while externally, there is a scarcity of partner institutions that share the same vision as the business world and industry within the context of the social sciences field.

Keywords: Problems and Dilemmas; MBKM Curriculum; Social Sciences Dicine

ABSTRAK

Implementasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) pada program studi kependidikan di perguruan tinggi swasta rumpun IPS di Lombok masih menghadapi berbagai problematika dan dilema meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan maupun pedoman pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika implementasi kurikulum MBKM pada program studi kependidikan perguruan tinggi swasta rumpun IPS di Lombok serta menganalisis dan mengelaborasi dilema yang muncul dalam implementasinya. Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan menggabungkan dua jenis metode, yaitu studi pustaka (literatur review) dan studi lapangan (*field study*). Temuan kajian ini adalah masih minimnya dukungan anggaran dari sebagian besar lembaga, termasuk kompetensi dan kepedulian dosen sehingga minat mahasiswa juga sangat rendah dalam implementasinya. Sisi lain, dilema yang dihadapi dalam implementasinya yakni dilema yang datang dari internal berupa kurikulum dan kultur akademik pada perguruan tinggi sementara eksternal masih minimnya lembaga sebagai mitra kerja sama yang memiliki visi yang sama dengan dunia usaha dan industri dalam konteks rumpun ilmu sosial.

Kata Kunci: Problematika dan Dilema; Kurikulum MBKM; Prodi Kependidikan; Rumpun IPS

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perguruan tinggi memiliki peran strategis menyiapkan potensi sumber daya manusia (SDM) andal dan kompeten di semua lini kehidupan dan pembangunan di segala sektor, termasuk pembangunan manusia dan

kebudayaan sebagai fondasi membangun peradaban bangsa di masa depan. Hal ini seiring dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia untuk menciptakan manusia seutuhnya yang memiliki kualitas demi terwujudnya kesejahteraan nasional (Ridwan, 2022).

Bersamaan dengan tidak terhindarkannya tuntutan kemajuan teknologi terhadap kebutuhan SDM unggul, inovatif dan kompetitif, maka hal itu merupakan suatu keniscayaan dalam pembangunan di semua lini kehidupan tanpa terkecuali, termasuk bidang pendidikan dan lebih-lebih pendidikan tinggi yang merupakan jenjang terakhir sekaligus titik awal mengenal dan memasuki dunia kerja. Oleh sebab itu, Peningkatan dan pengembangan kualitas perguruan tinggi merupakan prioritas utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif pada zaman revolusi industri 4.0 atau masyarakat 5.0. Dalam kerangka ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kebijakan Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai sebuah transformasi dalam dunia pendidikan yang diharapkan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis dan kepemimpinan yang kuat, tetapi juga memiliki kemampuan interpersonal yang baik dan kepribadian yang berkualitas (Syarifuddin et al., 2021).

Terkait hal tersebut Mendikbud RI Nadim Makarim menyatakan bahwa seiring perubahan waktu di era revolusi industri 4.0 yang sangat erat dengan teknologi, MBKM hendak memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Karena itulah, pentingnya dukungan kebijakan dari setiap perguruan tinggi beserta segala implikasinya yang logis sangatlah dibutuhkan. Hal ini menuntut adanya keselarasan dalam penerapan kebijakan yang komprehensif oleh mahasiswa, dosen, serta staf kependidikan agar setiap keputusan terkait MBKM dapat memberikan dukungan serta mendorong pencapaian proses pembelajaran yang optimal.

Sejak diluncurkan pada tahun 2020, MBKM telah menyita perhatian yang sangat luar biasa dari semua penyelenggara pendidikan tinggi dan menjadi program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ritek Dikti di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim. Khusus bagi perguruan tinggi yang berjenis Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), MBKM yang esensinya merupakan suatu program disederhanakan dan dipermudah secara terminologi menjadi Kurikulum MBKM, karena dua hal: 1) implementasinya harus dimulai dengan perubahan atau penyesuaian kurikulum semua program studi yang sedang berlaku dengan program MBKM; dan 2) saling berkolerasi dan berinterseksi dengan program guru penggerak dan sekolah penggerak sebagai langkah awal persiapan implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Konteks inilah muncul beragam opini, respon, reaksi, interpretasi, bahkan kontroversi di kalangan pengelola program studi kependidikan.

Temuan penulis, kajian artikel ini relatif banyak yang sudah membahas tentang MBKM dalam berbagai perspektif dan pendekatan. Namun dari sekian banyak publikasi hasil penelitian yang ada, salah satu yang memiliki cukup relevansi dengan kajian ini adalah penelitian yang dilakukan Fuadi dan Aswita (2021), dengan mengangkat tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Bagaimana Penerapan dan Kendala yang Dihadapi Perguruan Tinggi Swasta di Aceh. Temuan dalam penelitian ini terdapat beberapa kendala di antaranya: melakukan proses penyesuaian kurikulum dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui program MBKM, kampus sebagai mitra relatif terbatas, kerjasama perguruan tinggi swasta dengan pihak luar masih minim, pihak yayasan belum mendistribusikan anggaran pelaksanaan MBKM, serta problem kualitas dan produktivitas sumber daya dosen, dan mahasiswa.

Pada level mikro di daerah seperti Lombok, masing-masing perguruan tinggi yang mengelola program studi kependidikan memiliki sikap dan kebijakan yang berbeda dalam merespon kebijakan kurikulum dengan "label MBKM" tersebut. Ada yang terlihat tidak menanggapi, ada yang sebatas memenuhi kewajiban, ada yang sekedar berpartisipasi, tetapi ada juga yang sedang berupaya sungguh-sungguh menyiapkan segala sumber daya yang ada. Program studi kependidikan dari beberapa perguruan tinggi di daerah Lombok yang sudah melaksanakan program MBKM baik yang diselenggarakan dan difasilitasi Kemdikbud, maupun secara mandiri, menghadapi banyak problematika dan dilema. Jika hal-hal problematis dan dilematis tersebut hanya dianggap sebagai tantangan dalam dinamika perubahan paradigma pendidikan dan disikapi secara pragmatis-instrumentalis, maka proses, hasil, dan dampak yang dicita-citakan justru akan kontradiktif dengan landasan filosofis pendidikan yang diinspirasi oleh gagasan Ki Hajar Dewantara bahwa sejatinya pendidikan adalah untuk memerdekakan dan memandirikan anak didik.

Konteks ini, perguruan tinggi perlu memberikan peningkatan pemahaman terhadap pemangku kepentingan dan memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, seperti memperhatikan minat dan bakat serta kebutuhan mahasiswa (Rahman, 2023). Pada penelitian yang dilakukan (Mariati, 2021) mengenai tantangan dan solusi MBKM menemukan masih banyak para pemangku kepentingan dan dosen mengalami miskonsepsi mengenai implementasi MBKM tersebut.

Merujuk pada deskripsi mengenai indikasi terjadinya kesenjangan antara konsep-konsep teoretis dan normatif yang diidealkan dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan sebagaimana uraian di atas, permasalahan dalam tulisan ini menjadi menarik dan penting untuk dikaji dengan tujuan sebagai berikut: (1) mengidentifikasi problematika implementasi kurikulum MBKM pada program studi kependidikan rumpun IPS di daerah Lombok; dan (2) menganalisis dan mengelaborasi dilema implementasi kurikulum MBKM pada program studi kependidikan rumpun IPS di daerah Lombok. Adapun ruang lingkup subjek kajian adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh daerah pulau Lombok, yang mengelola program studi kependidikan dalam rumpun IPS atau kelompok disiplin ilmu-ilmu sosial.

METODE

Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif yang biasa dipergunakan untuk eksplorasi oleh akademisi atau peneliti di bidang sosial, humaniora, dan agama (Gunawan, 2013). Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan dua metode, yakni studi literatur (*library research/literature review*) yang melibatkan analisis berbagai sumber informasi dari literatur primer dan sekunder (Jalali & Wohlin, 2012), dan studi lapangan (*field study*) yaitu penelitian yang esensinya ada pada penentuan lokasi dan subjek penelitian yang lazim disebut responden atau informan (Small, 2011).

Tahap penelitian dimulai dari penelusuran sumber kepustakaan baik primer maupun sekunder seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, makalah, peraturan perundang-undangan, berita media cetak atau online, serta informasi web. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasi berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian, untuk selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data atau sitasi referensi. Tahap berikutnya menyusun desain penelitian dan menguji instrumen lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi dan subjek yang telah ditentukan. Data hasil studi pustaka dan hasil studi lapangan ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis isi (*conten analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Singkat Program MBKM

MBKM terdiri atas dua konsep penting yaitu “Merdeka Belajar” dan “Kampus Merdeka”. Konsep pertama memiliki makna adanya kemerdekaan di dalam berpikir, dan kemerdekaan berpikir harus dimulai oleh para pendidik. Konsep kedua merupakan kelanjutan dari konsep pertama, dimana kampus diupayakan terlepas dari belenggu supaya bisa bergerak lebih leluasa (Marjan Fuadi, 2022). Secara garis besar, program MBKM merupakan tanggung jawab yang berasal dari beberapa regulasi dalam pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi. Ini termasuk peraturan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN. Secara spesifik, kebijakan MBKM dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama dalam pasal 15 hingga 18 (Meke et al., 2021).

Program MBKM bertujuan untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, bermartabat, produktif, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Sodik et al., 2021). Program yang merupakan kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di program studi dan/atau di luar kampus (Junaidi et al., 2020). Maksud lainnya adalah untuk meningkatkan kemampuan lulusan, baik dalam aspek keterampilan interpersonal maupun teknis, sehingga mereka menjadi lebih siap dan sesuai dengan tuntutan zaman. Selain

itu, program ini bertujuan untuk mempersiapkan lulusan agar menjadi pemimpin yang unggul dan memiliki karakter yang kuat untuk masa depan bangsa (Fuadi, 2021). MBKM juga merupakan suatu ikhtiar dalam memberikan pilihan pembelajaran terbaik bagi mahasiswa yang diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan kebutuhan sebagai dampak dari perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang semakin pesat (Fauziah & Devina, 2021).

Pandangan lain secara kritis menyatakan bahwa Kebijakan MBKM nampak secara terang-terangan menuju pemeliharaan serta pengembangan keterampilan tenaga kerja yang mendukung berlanjutnya sistem ekonomi kapitalis. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam proses pendidikan dengan penerapan konsep kampus merdeka, pada akhirnya ditujukan untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan dari sistem ekonomi kapitalis. Hal ini bertujuan agar para lulusan perguruan tinggi memiliki kesiapan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terikat pada sistem ekonomi kapitalis (Kodrat, 2021). Untuk meraih tujuan tersebut, kebijakan MBKM memberikan peluang dan tantangan dalam mengembangkan kreativitas, Kemampuan, sifat-sifat pribadi yang diinginkan oleh mahasiswa, dan kemauan untuk mandiri dalam mengejar serta memperoleh pengetahuan melalui pengalaman serta perkembangan lapangan seperti keterampilan yang dibutuhkan, situasi nyata yang dihadapi, interaksi dengan lingkungan sosial, kerja sama, pengaturan diri, tuntutan performa, tujuan, dan pencapaian (Kholik et al., 2022).

Melalui program MBKM, mahasiswa dapat memilih beberapa program dari delapan program yang ditawarkan. Para mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di luar kurikulum program studi mereka di perguruan tinggi selama satu semester atau setara dengan 20 sks. Penawaran mata kuliah ini terbatas pada program yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi tersebut. Berikutnya mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan selama dua semester atau setara 40 SKS di luar kampus, baik memilih prodi yang sama atau lintas prodi, atau mengikuti program selain perkuliahan di instansi/isntituti non perguruan tinggi. Mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 15 ayat 1, kegiatan pembelajaran melalui program MBKM dapat dilakukan dalam 8 bentuk program meliputi: 1) pertukaran pelajar, 2) magang/praktik kerja, 3) asistensi mengajar di satuan pendidikan, 4) membangun desa/KKN Tematik, 5) penelitian/riset, 6) kegiatan kewirausahaan, 7) studi/proyek independent, dan 8) proyek kemanusiaan (Fuadi & Aswita, 2021).

Deskripsi Singkat Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian meliputi seluruh kabupaten/kota yang ada di daerah Lombok. Lombok merupakan salah satu pulau dari dua pulau besar yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan jumlah penduduk 2/3 dari total penduduk NTB. Daerah Pulau Lombok terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota madya yaitu; Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Dari kelima wilayah kabupaten/kota yang ada di daerah atau Pulau Lombok, daerah yang paling banyak sebagai lokasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), baik yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama yakni Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur. Alasan utama yang paling logis sekaligus empiris adalah karena Kota Mataram merupakan ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah yang paling besar jumlah penduduknya.

Adapun jumlah PTS di daerah Lombok yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 28 lembaga, dengan rincian 11 lembaga berstatus universitas, 14 lembaga dengan status institut, dan 3 lembaga berstatus akademi (Pangkalan Data Dikti, 2020). Dari 28 PTS yang ada di daerah Lombok tersebut, terdapat 5 (lima) lembaga penyelenggara program studi kependidikan dengan bidang keahlian (rumpun) Ilmu Pengetahuan Sosial atau Ilmu-Ilmu Sosial, dan juga berstatus universitas. Kelima universitas swasta tersebut masing-masing; Universitas Hamzanwadi dan Universitas Gunung Rinjani di Lombok Timur, Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, dan Universitas Nahdlatul Ulama NTB di Kota Mataram.

Subjek dalam penelitian yang dijadikan sebagai informan atau sumber informasi yaitu; pimpinan universitas (rektor dan/atau wakil rektor), pimpinan fakultas (dekan dan/atau wakil dekan); pimpinan program studi (ketua atau koordinator program studi); dan koordinator PT untuk MBKM di kelima universitas lokasi penelitian. Adapun sumber data dokumen diambil dari beberapa pedoman atau panduan pelaksanaan kurikulum di masing-masing universitas dan fakultas yang dikembangkan dan disesuaikan dengan program

MBKM. Data yang bersumber dari informan diambil dengan teknik wawancara terstruktur dan wawancara mendalam. Data yang bersumber dari dokumen diambil dengan teknik dokumentasi jenis elisitasi dokumen.

Problematika Implementasi Kurikulum MBKM Pada Program Studi Kependidikan Rumpun IPS di Daerah Lombok

Pada tahun 2023 ini praktis program MBKM sudah berjalan selama tiga tahun sejak pertama kali diluncurkan, namun dalam tataran implementasi masih jauh dari harapan, lebih-lebih untuk konteks perguruan tinggi swasta di daerah-daerah. Kondisi demikian sangat nampak pada sebagian besar perguruan tinggi swasta yang ada di daerah Lombok, tidak terkecuali di lima perguruan tinggi (universitas) yang dijadikan sebagai lokasi dan subyek penelitian. Implementasi program MBKM, baik yang dikelola Kemendikbud, terlebih pengelolaannya bersifat mandiri oleh PT masing-masing, membutuhkan ketersediaan pedoman, panduan, dan aturan-aturan akademik lainnya sebagai pedoman operasional yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi dan tindak lanjut.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur dan kajian lapangan di lokasi penelitian, teridentifikasi bahwa dokumen-dokumen penting sebagai acuan yang harus disesuaikan dengan kurikulum program studi, baik dalam bentuk pedoman, panduan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, maupun aturan-aturan pendukung-pelengkap lainnya belum dipersiapkan, apalagi tersedia secara memadai. Ada tiga klasifikasi kondisi problematis terkait ketersediaan dokumen "Kurikulum MBKM" yakni; 1) perguruan tinggi, fakultas, dan prodi sama sekali belum berupaya menyiapkan dan menyediakan, 2) perguruan tinggi, fakultas, dan prodi baru mulai menyiapkan dan menyediakan, 3) perguruan tinggi, fakultas, dan prodi sudah menyiapkan dan menyediakan, tetapi belum melaksanakan secara operasional.

Kondisi di atas sangat nyata sebagai suatu problematika dalam implementasi MBKM pada program studi kependidikan rumpun IPS di daerah Lombok, karena hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggungjawab perguruan tinggi, fakultas, dan prodi sebagaimana diamanatkan oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi punya kewajiban untuk memberikan fasilitasi hak mahasiswa: (a) dapat mengambil sistem kredit semester di luar kampus paling lama dua semester yang setara dengan 40 sistem SKS, dan (b) Bisa menyelesaikan sejumlah SKS di program studi yang berlainan di institusi yang sama selama satu semester (setara dengan 20 SKS).

Kemudian, perguruan tinggi (fakultas) diwajibkan untuk: (a) menyusun daftar mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diambil oleh mahasiswa lintas program studi, dan (b) menyiapkan dokumen kerja sama dengan mitra yang relevan. Sementara itu, program studi memiliki tanggung jawab untuk: (a) merancang dan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan implementasi model kampus merdeka, (b) memfasilitasi mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran lintas program studi di perguruan tinggi, (c) menyediakan daftar mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan perguruan tinggi beserta persyaratannya, (d) mengevaluasi kelayakan mata kuliah dari pembelajaran di luar program studi dan perguruan tinggi, dan (e) jika ada mata kuliah yang belum dapat dipenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar program studi dan perguruan tinggi, disediakan pilihan mata kuliah dalam jaringan (online).

Masalah yang telah disebutkan secara langsung memiliki dampak pada timbulnya kendala bagi mahasiswa yang hendak memanfaatkan haknya, dimulai dari tahap (1) merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai mata kuliah/program yang akan diambil di luar program studi, (2) mendaftar untuk program kegiatan di luar program studi, (3) memenuhi persyaratan kegiatan di luar program studi, termasuk mengikuti seleksi, dan (4) mengikuti program kegiatan di luar program studi sesuai dengan pedoman akademik yang berlaku. Problematika ini masih dipersulit lagi kondisinya karena belum terjalannya hubungan kerja sama dengan pihak mitra yang relevan, beragam, dan berkelanjutan. Konteks inilah yang dimaksud dalam pedoman MBKM Kemendikbud supaya PT/fakultas/program studi menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan pihak mitra dalam rangka pelaksanaan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama tersebut.

Problem-problem umum yang teridentifikasi atau ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) dukungan pembiayaan/anggaran dari sebagian besar lembaga atau yayasan untuk program MBKM mandiri belum ada, sebagian kecil yang sudah menyediakan jumlahnya terbatas dan nilainya sangat kecil, serta sebatas kompensasi dari kegiatan akademik yang sudah ada; (2) kompetensi dan kepedulian dosen untuk

mendukung program MBKM masih sedikit dari segi jumlah dan masih rendah dari segi produktivitas, termasuk upaya memotivasi mahasiswa yang menjadi kelas bimbingannya; dan (3) prosentase partisipasi mahasiswa yang memiliki ketertarikan dan kapasitas atau kompetensi untuk menggunakan haknya masih sangat rendah (rata-rata di 5 universitas masih di bawah 5%).

Adapun problem spesifik yang dihadapi program studi kependidikan rumpun IPS di daerah / Pulau Lombok dalam implementasi MBKM adalah sebagai berikut: (1) dari delapan bentuk kegiatan yang ditawarkan Kemendikbud hanya dua program yang paling diminati untuk diikuti oleh mahasiswa yaitu Kampus Mengajar (KM) dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM), serta PT yang sudah melaksanakan MBKM mandiri dalam bentuk Asistensi Mengajar dan KKN Bina Desa seperti Universitas Hamzanwadi di Lombok Timur; (2) keterbatasan mitra kerja sama yang relevan di luar lembaga pendidikan dan wilayah pedesaan menjadi faktor penyebab mahasiswa kurang tertarik mengikuti selain program KM dan PMM, serta PT/fakultas/prodi mengalami kesulitan mengembangkan program selain Asistensi Mengajar dan KKN Bina Desa.

Dilema Implementasi Kurikulum MBKM Pada Program Studi Kependidikan Rumpun IPS di Daerah Lombok

Berbagai macam problematika yang dihadapi oleh program studi kependidikan rumpun IPS di daerah / Pulau Lombok dalam implementasi “Kurikulum MBKM”, baik yang bersifat umum maupun spesifik, berkorelasi secara resiprokal dengan dilema yang dialami pada saat melakukan implementasi. Dilema yang dihadapi program studi kependidikan rumpun IPS di daerah / Pulau Lombok dapat dibagi dalam dua kategori yaitu dilema internal dan dilema eksternal. Dilema internal yang dimaksud adalah dilema yang dipengaruhi oleh aspek kurikulum dan kultur akademik, sedangkan dilema eksternal yang dimaksud adalah dilema yang disebabkan oleh faktor kelembagaan perguruan tinggi dan non perguruan tinggi.

Terkait aspek kurikulum program studi kependidikan rumpun IPS, dilema internal yang dialami mulai terasa ketika program studi akan melakukan adaptasi kurikulum dengan program MBKM. Sudah umum dipahami bahwa program studi kependidikan membangun visi, misi, tujuan, dan sasaran utamanya adalah mencetak calon-calon pendidik (guru) profesional di bidang keahlian masing-masing, sedangkan esensi kebijakan MBKM tidak menawarkan kebaruan sebagaimana gagasan Menurut Althusser, institusi pendidikan tidak hanya menghasilkan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga secara bersamaan menghasilkan ketaatan terhadap aturan atau peraturan sehingga lulusan pendidikan tinggi dicetak sebagai produk yang siap terjun ke dunia kerja berupa dunia usaha dan dunia industri menjadi tenaga kerja yang melangsungkan reproduksi kapitalisme global (Rahmat et al., 2022). Dilema di atas semakin rumit dan berat, karena pada periode sebelumnya kurikulum pendidikan tinggi mestinya disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sehingga dikenal dengan “Kurikulum KKNI”.

Dilema berikutnya terkait dengan ketertarikan dan pilihan sebagian besar mahasiswa untuk ikut berkontribusi mulai program Kampus Mengajar yang dikelola oleh Kemendikbud dengan dukungan pembiayaan yang memadai, sehingga memunculkan orientasi finansial dan kebanggaan personal karena melalui seleksi yang ketat. Sementara itu ketersediaan pedoman yang tidak memadai bahkan tidak ada di masing-masing perguruan tinggi dan minimnya sosialisasi menyebabkan sebagian dosen pengampu mata kuliah reguler tidak tahu-menahu dan bersikap tidak mau tahu dengan mahasiswa yang mengikuti KM. Dilema lebih spesifik yang dialami program studi kependidikan rumpun IPS terkait dengan sasaran utama program KM yaitu sekolah dasar, meskipun sama-sama kependidikan (keguruan) tetapi berbeda jauh jika diukur dari capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, termasuk karakteristik mahasiswa PGSD. Realitas ini menimbulkan dampak negatif terhadap prestasi atau hasil belajar mahasiswa, sehingga dari sisi akademik merugikan pihak mahasiswa.

Tidak tersedianya secara memadai atau bahkan tidak tersedia sama sekali pedoman dalam bentuk dokumen kurikulum bermuatan MBKM sebagai landasan kebijakan bagi ketua/koordinator program studi untuk mengambil keputusan tentang pengakuan atas program Kampus Mengajar/Asistensi Mengajar, KKN Bina Desa, dan PMM melalui *equivalensi* atau konversi ke dalam mata kuliah menjadi dilema yang paling dilematis antara memenuhi hak mahasiswa di satu sisi dengan upaya mewujudkan profil lulusan dan capaian pembelajaran di sisi lain. Kondisi demikian menyebabkan ketua/koordinator program studi mengambil kebijakan dalam keadaan terpaksa dengan cara melakukan konversi “tutup mata”. Pelaksanaan kebijakan yang seperti ini, meskipun belum menjadi fenomena umum tetapi justru jelas-jelas kontraproduktif dengan tujuan

awal MBKM yaitu memberikan pembelajaran yang terbaik kepada mahasiswa untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan dan kualitas lulusan.

Konteks perguruan tinggi swasta di daerah-daerah seperti Lombok, semakin mempertajam dilema-dilema yang terkait dengan aspek kurikulum di atas oleh karena budaya akademik dan atmosfer intelektualitas belum tumbuhkembang dengan baik. Sejalan dengan itu nilai filosofi dan prinsip dasar civitas akademika yang terdiri atas kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan mengalami stagnasi, bahkan cenderung mengalami kemunduran. Padahal nilai filosofi dan prinsip dasar civitas akademika tersebut merupakan pilar dari konsep merdeka belajar-kampus merdeka yang tengah digaungkan. Kemerdekaan belajar hanya akan tumbuh dan berkembang baik di tengah-tengah kampus yang demokratis, terbuka, dan egaliter. Kemandirian belajar akan tercipta jika terjadi kemerdekaan dalam proses pembelajaran.

Dilema eksternal yang disebabkan oleh faktor kelembagaan meliputi: pihak perguruan tinggi swasta bersangkutan dalam hal ini terdiri dari lima universitas yang menjadi lokasi penelitian; pihak mitra kerja sama seperti satuan pendidikan, perusahaan daerah, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan swasta, serta lembaga-lembaga lainnya; dan pihak kementerian pendidikan dan kebudayaan. Dilema pertama muncul dari adanya Permendikbud Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) mengamanahkan semua PT, baik negeri maupun swasta untuk memfasilitasi hak mahasiswa, sementara persoalan klasik yang dialami sebagian besar PTS di Indonesia termasuk di daerah Lombok selalu berkaitan dengan fasilitas pembiayaan dan sarana/prasarana yang sangat terbatas dari pihak yayasan. Fakta ini menjadi faktor determinan pimpinan PT/Fakultas/Prodi mengalami kesulitan untuk melaksanakan dan mengembangkan MBKM secara mandiri.

Dilema eksternal selanjutnya terkait dengan keterbatasan pilihan program studi kependidikan rumpun IPS dalam mencari dan menentukan calon mitra kerja sama yang relevan dengan kurikulum program studi masing-masing, lebih-lebih jika sasaran program MBKM disimplifikasi orientasinya hanya pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan informasi dari informan, bahwa upaya menjalin kerja sama sudah banyak dilakukan sebelum diluncurkannya program MBKM, namun mitra kerja sama yang digandeng didominasi oleh instansi pemerintah daerah dan pemerintah desa yang relevansinya masih diragukan, serta belum berdasarkan pada kebutuhan riil mahasiswa program studi kependidikan rumpun IPS.

Semua dilema di atas dapat diurai dan dikurangi jika penyelenggara pendidikan tinggi dan pengelola program studi kependidikan rumpun IPS lebih fokus membidik program MBKM yang berbentuk penelitian, *edupreneurship/sociopreneurship*, studi/projek independen, dan proyek kemanusiaan. Bukankah empat bentuk program MBKM yang lain sudah biasa dilaksanakan pada era sebelumnya meskipun dipersepsi dalam versi konvensional, serta sudah diselenggarakan secara nasional oleh Kemendikbud. Penting juga untuk dipahami bahwa lembaga pendidikan tinggi bukan hanya tempat mereproduksi pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tempat menggasah potensi kepemimpinan dan membangun kepribadian mahasiswa.

KESIMPULAN

Temuan hasil kajian, problematika implementasi kurikulum MBKM pada Program Studi Kependidikan Rumpun IPS di Daerah Lombok berupa dukungan anggaran yang minim sehingga dosen mahasiswa kurang tertarik mengikuti. Secara spesifik hanya dua program yang paling dimita mahasiswa dari jumlah program yang ada. Sedangkan dilemanya ditemukan dua kategori yaitu dilema internal yang dipengaruhi oleh aspek kurikulum dan kultur akademik, sedangkan dilema eksternal disebabkan oleh faktor kelembagaan perguruan tinggi dan non perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

- Dirjen Pendidikan Tinggi. (2020). Statistik Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fauziah, Y., & Devina, V. (2021). Pengaruh Implementasi Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm) Terhadap Mahasiswa di Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. *Abdimas*, 8(2), 117-123.

- Fuadi, T. M., & Aswita, D. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Bagaimana penerapan dan kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi swasta di aceh. *Merdeka Belajar Kampus Merdeka.... (Fuadi & Aswita, 5(2), 603-614*. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/dedikasi>
- Jalali, S., & Wohlin, C. (2012). Systematic literature studies: Database searches vs. backward snowballing. *International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, 29-38*. <https://doi.org/10.1145/2372251.2372257>
- Junaidi, A. et al. (2020). Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (Sri Suning Kusumawardani, Ed.).
- Kholik, A., Bisri, H., Lathifah, Z. K., Kartakusumah, B., Maufur, M., & Prasetyo, T. (2022). Impelementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berdasarkan Persepsi Dosen dan Mahasiswa. *Jurnal Basicedu, 6(1), 738-748*. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.2045>
- Kodrat, D. (2021). Industrial Mindset of Education in Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Policy ARTICLE INFO ABSTRACT Article History. *Jurnal Kajian Peradaban Islam OPEN ACCESS JKPIs, 4(1), 2021*. www.jkpis.com
- Mariati, M. (2021). Tantangan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. 747-758. <https://doi.org/10.53695/SINTESA.VIII.405>
- Marjan Fuadi, T. (2022). Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Mbkkm) : Aplikasinya Dalam Pendidikan Biologi. *Prosiding Seminar Nasional Biotik, 9(2), 38*. <https://doi.org/10.22373/pbio.v9i2.11594>
- Meke, K. D. P., Astro, R. B., & Daud, M. H. (2021). Impact of the Independent Campus Learning Policy (MBKM)at private Universities in Indonesia. *EDUKATIF : Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(1), 675-685*.
- Rahman, M. A. (2023). *Tantangan dan Solusi Dalam Implementasi Program Kebijakan “ Merdeka Belajar , Kampus Merdeka ” (MBKM) di Perguruan Tinggi*. 1-8.
- Rahmat, Hartono, & Muharrar, S. (2022). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Objektifikasi Kritis Pendidikan Seni. *Jurnal Seni Pertunjukan Boting Langi, 4(1), 215-225*.
- Ridwan, F. (2022). Mutu Pendidikan Pesantren. *ALACRITY: Journal of Education, 2(1), 48-55*. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v2i1.56>
- Small, M. L. (2011). How to conduct a mixed methods study: Recent trends in a rapidly growing literature. *Annual Review of Sociology, 37, 57-86*. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.012809.102657>
- Sodik, J., Purwiyanta, P., & Wijayanti, D. L. (2021). Village Economic Potential for The Implementation of Learning Building Village / KKN Thematic MBKM Program Economic Study Program Development Department of Economics, Faculty of Economics and Business of The UPN “Veteran” Yogyakarta. *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences, 1(3), 179-184*. <https://doi.org/10.31098/bmss.v1i3.317>